

KEMITRAAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA, DAN PARIWISATA DENGAN  
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI  
KABUPATEN ENREKANG

SAMSINAR

Stambuk : 1056 4019 1114



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**KEMITRAAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN  
PARIWISATA DI KABUPATEN ENREKANG**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun dan diusulkan oleh

**SAMSINAR**  
10564 01911 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

Nama Mahasiswa : Samsinar

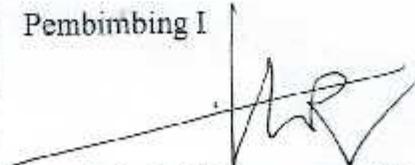
Nomor Stambuk : 105640191114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

  
**Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM**

Pembimbing II

  
**Rudi Hardi, S.Sos., M.Si**

Mengetahui

Dekan

FISIPOL UNM Makassar



**Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

  
**Dr. Nuryani Mustari, S.IP., M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A3- VIII/L/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari jum'at Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019

## TIM PENILAI

**Ketua**



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

**Sekretaris**



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji,

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Ahmad Taufiq, S.IP, M.AP



## ABSTRAK

**SAMSINAR : “Kemitraan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang”.** Di bimbing oleh (Pembimbing I St. Nurmaeta dan Pembimbing II Rudi Hardi).

Pariwisata melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya, menyentuh banyak aspek dan turut membawa unsur-unsur pariwisata untuk terlibat dalam pengembangannya. Sehingga Kemitraan antar aktor dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kelompok Masyarakat perlu dirancang serta dijalin secara matang dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Dimana penulis sebagai instrument kunci (*key instrument*) terjun langsung kelapangan untuk mencari berbagai fakta terkait dengan objek yang diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, Ketua Kelompok Kerja (POKJA), pengelola objek wisata serta masyarakat sekitar objek wisata Buttu Macca. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang, dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yakni, adanya prinsip saling percaya terjalinnya komunikasi yang terbuka dan keadilan yang belum sepenuhnya berjalan antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat, adapun faktor pendukung dalam kemitraan ini yakni terjalinnya kepercayaan dan komunikasi antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yakni prinsip keadilan yang belum sepenuhnya berjalan.

Kata Kunci : Kemitraan, Kelompok Masyarakat, Pengembangan Pariwisata

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsinar

Nomor Stambuk : 10564 01911 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja penulis sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, Januari 2019

Yang Menyatakan,

Samsinar

## **KATA PENGANTAR**

*“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM sebagai pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Teriring Doa semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan. Aamiin

Terkhusus kedua orang tuaku tercinta Jenab dan Nur Baya atas segala bimbingan, semangat, doa, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan

sujud serta doa semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Dan kepada saudara-saudara saya Syainal S.Pd, Riska Wati, Lisda Yanti, Zahwa Rizkina Inayah serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, doa serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ibu , Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya, selalu memberikan semangat dan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di Universitas ini.
3. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini. dan Segenap staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
4. Kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Bapak Hamsir beserta para aparatnya, BUMDes Pattondonsalu, dan Pengelola objek wisata Buttu Macca.

5. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menemani berjuang, membantu, memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini kak Irwan S.Pd, Dian Ernaya, Elisa Indri Pertiwi Idris, Nur Aulia, Rosnaeni, Sutra Dewi, dan Syarifa Aini.
6. Kepada saudara-saudara saya di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 014 yang banyak membantu dalam melengkapi data penelitian penulis ditengah kesibukannya, dan saudara-saudara ku kelas B yang saya cintai terimakasih atas segala bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudara saya di Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Cab. Makassar, yang telah menemani saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, membantu dan memberikan ilmu yang tidak saya dapat dibangku perkuliahan, serta membantu saya dalam penelitian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Makassar, Januari 2019

**Samsinar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan . . . . .	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah . . . . .	ii
Abstrak . . . . .	iii
Kata Pengantar . . . . .	iv
Daftar Isi . . . . .	vii
Daftar Tabel . . . . .	x
Daftar Gambar . . . . .	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang . . . . .	1
B. Rumusan Masalah . . . . .	5
C. Tujuan Penelitian . . . . .	5
D. Manfaat Penelitian . . . . .	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA . . . . .</b>	<b>7</b>
A. Konsep Kemitraan . . . . .	7
B. Konsep Kelompok Masyarakat . . . . .	12
C. Konsep Pariwisata . . . . .	13
D. Konsep Pengembangan Pariwisata . . . . .	19
E. Kerangka Fikir . . . . .	21
F. Fokus Penelitian . . . . .	22
G. Deskripsi Fokus Penelitian . . . . .	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN . . . . .</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian . . . . .	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian . . . . .	26
C. Sumber Data . . . . .	27
D. Informan Penelitian . . . . .	28
E. Teknik Pengumpulan Data . . . . .	28
F. Teknik Analisa Data . . . . .	29
G. Keabsahan Data . . . . .	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian .....	32
B. Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang .....	57
C. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang .....	67
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Enrekang .....	35
Tabel 4.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 .....	36
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 .....	38
Tabel 4.4 Jumlah Pengelola Buttu Macca .....	48
Tabel 4.5 Jumlah Pengunjung Tahun 2016-2017 .....	50
Tabel 4.6 Wahana dan Spot Foto .....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.I Bagan Kerangka Fikir .....	22
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Enrekang .....	37
Gambar 4.2 Struktur BUMDes .....	49
Gambar 4.3 Wahana Objek Wisata Buttu Macca . .....	51
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam aline ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan Kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Maka Pemerintah selaku pelayan publik merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam mewujudkan.

Dalam mewujudkan upaya tersebut, Ryas Rasyid dalam (Muhadam, 2014) membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Pada fungsi pembangunan, pemerintah diharapkan mampu menyejahterahkan rakyatnya melalui pembangunan fisik maupun non fisik dengan sasaran-sasaran yang jelas disegala aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu sektor yang potensial dan dipandang memiliki prospek yang cerah dalam pembangunan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor ini dapat memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah dan diakui sebagai sektor yang menjajikan oleh UNWTO (*The United Nation World Tourim Organization*). Setiap daerah yang tersebar diwilayah Indonesia memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing yang dapat menjadi nilai jual yang tinggi khususnya disektor pariwisata. Oleh karena itu, untuk memperluas

lapangan pekerjaan, memperkenalkan kebudayaan, dan meningkatkan penerima devisa, maka mulai tahun 1978, pemerintah selalu berusaha untuk melakukan pengembangan dalam bidang kepariwisataan. Dalam melakukan pengembangan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan dan memelihara nilai-nilai kepribadian nasional serta nilai-nilai kebudayaan..

Pariwisata sedang menjadi primadona dalam dunia industri dewasa ini, pariwisata akan memberikan wajah baru yang lebih menyenangkan bagi suatu daerah. Perlu dicermati hal yang menjadi point penting dalam peristiwa ini. Pertama pariwisata telah menjadi sektor yang dipandang dalam perkembangan suatu daerah. Pariwisata kini tidak lagi dimaknai sebagai kegiatan yang identik dengan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang tetapi telah tumbuh menjadi sebuah industri besar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah, kota bahkan Negara melalui segala aspek yang terkait dengannya dimana sektor ekonomi dinilai paling banyak terkena dampak positif dari kegiatan pariwisata. Kedua, pariwisata daerah telah menjadi sektor andalan untuk menciptakan kehidupan daerah yang lebih ramah bagi masyarakatnya, pariwisata dirasa dapat membawa pengaruh baru yang positif untuk masyarakat suatu daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pariwisata disuatu daerah dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah pengunjung yang berwisata ke daerah tersebut. Semakin menarik dan indah kepariwisataan suatu daerah, maka semakin tinggi jumlah pengunjung yang datang ke daerah wisata tersebut, dan semakin meningkat pula pendapatan daerah dan perekonomian masyarakatnya.

Dalam pengembangan pariwisata terdapat suatu bentuk kerjasama atau kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah hubungan kerjasama yang dilakukan berbagai pihak, atau gotong royong yang dilakukan secara individual maupun secara berkelompok.

Pariwisata memang merupakan sektor yang multidimensi. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam upaya membangun dan mengembangkan Kepariwisataan disuatu daerah, bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh *Stakeholders* yang ada. Dalam konsep manajemen kepariwisataan, ada dua pilar yang menjadi motor penggerak dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat. Kesinergisan peran antara kedua *stakeholders* tersebut sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance*, yang mana dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Tetapi lebih menggambarkan adanya pola kerjasama yang baik antar elemen yang ada, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bila melaksanakan pembangunan secara sepihak.

Realitas bahwa Kabupaten Enrekang memiliki potensi daya tarik wisata baik itu alam maupun budaya yang terbilang cukup banyak dan tersebar disetiap wilayah Kecamatan, tentu dapat menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat

apabila dikembangkan secara maksimal dan profesional. Akan tetapi, sampai saat ini potensi-potensi wisata yang ada belum seluruhnya disentuh dan dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Serta masyarakat Enrekang yang kebanyakan bermatapencaharian petani kadang tidak merelakan lahannya dikembangkan menjadi tempat wisata, karena di fikiran mereka jika lahan mereka dikembangkan menjadi tempat wisata mereka akan kehilangan pekerjaan serta sumber penghasilan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman, kurang komunikasi serta dalam negosiasi pihak pemerintah masih kurang bisa meyakinkan masyarakat setempat bahwa tempat wisata tersebut nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan selain bertani.

Salah satu objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan yakni objek wisata Buttu Macca yang terletak di jalan poros Enrekag-Toraja, lokasi tepatnya di Desa Patondonsalu , Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Objek wisata Buttu Macca terletak 15 Km dari Kota Enrekang atau sekitar 245 Km dari Kota Makassar, Objek wisata yang baru dibuka tahun lalu ini menyajikan panorama alam perbukitan yang menarik penunggunj untuk berwisata ke tempat ini. Untuk menuju spot favorit dan menikmati keindahan alam perbukitan yang disajikan ditempat wisata ini, pengunjung harus berjalan sekitar 100 meter dari tempat parkir, namun setelah sampai rasa lelah akan terbayar oleh panorama perbukitan yang sangat mempesona. Para wisatawan juga dapat memanjakan mata sembari beristirahat di Villa Bambapuang yang terletak sekitar 500 meter dari Objek wisata Buttu Macca.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Andini, 2017:5) menyatakan bahwa konsep matang dari perencanaan pariwisata tentu harus didukung oleh kesiapan *stakeholders*. Pariwisata melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya, menyentuh banyak aspek dan turut membawa unsur-unsur pariwisata untuk terlibat dalam pengembangannya. Kemitraan antar aktor perlu dirancang serta dijalin secara matang dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dibidang pariwisata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “*Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk memberikan batasan dalam proses penelitian ini, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang?
2. Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada Kemitraan Dinas, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi penulis kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Enrekang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kemitraan**

Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemitraan berasal dari kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Pada esensinya kemitraan diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama antara berbagai pihak atau gotong royong baik itu secara perorangan maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo dalam (Raman, 2015) kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan tugas bersama yang telah disepakati.

Ada berbagai pengertian secara umum pengertian kemitraan yakni: Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner. Kemitraan adalah adanya proses pencarian bentuk-bentuk interaksi yang secara sukarela dapat menguntungkan pihak bermitra serta saling berbagi pengalaman dan saling mendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Kemitraan adalah hubungan yang mencakup berbagai komponen, baik lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta sektor masyarakat yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing komponen demi mencapai tujuan bersama. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana

seorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, memilih, mengambil, serta melaksanakan tugas secara teratur, dan jika diperlukan meninjau ulang hubungan semua stakeholders serta memperbaiki kesepakatan awal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, saling berbagi keuntungan dan menanggung segala resiko secara bersama-sama. (Takbir.2013dalam Raman, dkk.2015).

Sesuai pernyataan (Notoatmodjo dalam Raman,dkk 2015) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak atau lebih merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama.
3. Ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
4. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Adapun dasar pertimbangan diperlukannya kerjasama atau kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat menurut Utomo (2004) mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Alasan politis, yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *Good Governance*.
2. Alasan administratif, yaitu terbatasnya sumber daya pemerintah dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset dan kemampuan manajemen.

3. Alasan ekonomis, yakni meningkatkan kontinuitas dan kualitas, memacu pertumbuhan dan produktivitas, serta mengurangi resiko, ketimpangan dan kesenjangan.

Atas dasar alasan tersebut diatas maka konsep kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.

1. Prinsip Kemitraan

Prinsip kemitraan yang dijadikan dasar etika dalam bisnis dan kerjasama yang harus diperhatikan bagi yang bermitra yaitu:

- a. Kepercayaan, seseorang yang akan bekerjasama dengan pihak atau orang lain tentunya harus memiliki mitra yang dapat dipercaya yang telah melalui proses uji kelayakan mitra, karena kepercayaan merupakan modal utama dalam berbisnis yang lahir dan dibangun dari pengalaman, bukan secara dadakan serta tidak muncul begitu saja. Kepercayaan dimunculkan dari proses yang mungkin dari waktu yang singkat bahkan bisa pula dari waktu yang lama.
- b. Komunikasi yang terbuka. Dikarenakan kerjasama didasarkan atas kepentingan kedua belah pihak, maka kerjasama harus ada komunikasi yang terbuka antar keduanya. Komunikasi kedua belah pihak penting, mengingat dalam bermitra memerlukan banyak informasi untuk menunjang kepentingan bersama. Pertukaran informasi dan diskusi kedua belah pihak mengenai usaha bersama yang dijalankan tidak mungkin

terjadi jika salah satu pihak menutup diri atau kurang terbuka. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan.

- c. Keadilan, Dalam kerjasama tentunya harus ada keadilan dari kedua belah pihak. Artinya bahwa bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka bukan hanya satu pihak saja yang harus menanggung kerugian tersebut, dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian adil menunjukkan sikap tidak berat sebelah atau menggunakan/merugikan pihak lain.  
(Raman dkk, 2015)

## 2. Manfaat Kemitraan

Agar berhasil melaksanakan kerjasama tentunya dengan saling memberikan manfaat pihak yang bermitra. Menurut (Hafsah dalam Takbir.2013) mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh dalam kemitraan, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi.
- b. Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien.
- c. Kemitraan mengurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya.
- d. Kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang besar.

## 3. Pola Kemitraan

Pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan tertentu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan

maupun pelaksanaan operasionalnya, merupakan implementasi dari hubungan kemitraan. Kebijakan yang berlaku disuatu wilayah tertentu sangatlah berpengaruh terhadap pembinaan kemitraan. Oleh karena itu operasional yang baik seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerja sama, secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah disepakati bersama, serta ditunjang dukungan dan kebijakan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan.

Pola kemitraan menurut Sulistyanti diilhami dari fenomena biologis kahidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:

- a. Kemitraan semu, adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang dimana tidak adanya kerjasama yang seimbang antara pihak yang satu dengan yang lainnya . Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan.
- b. Kemitraan mutualistik adalah interaksi atau hubungan kerjasama yang saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan bersama secara optimal, hal ini dikarenakan pihak yang bermitra sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan.
- c. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan

selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. (Sulistiyani dalam Raman,2015).

## **B. Konsep Kelompok Masyarakat**

Kelompok masyarakat adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai individu yang sudah berinteraksi, membentuk struktur, norma-norma, serta melakukan pembagian tugas tertentu secara teratur dan intensif. Sedangkan menurut Newcomb, Turner dan Converse (dalam Raman dkk,2015) kelompok masyarakat adalah sejumlah orang-orang, dilihat sebagai kesatuan tunggal, merupakan satu kesatuan sosial yang mempunyai ciri-ciri yang relatif stabil, dan mengadakan interaksi sosial.

Ciri-ciri kelompok masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok manusia yang disebut kelompok masyarakat memiliki suatu perasaan bersama, bahkan *sense of belonging* yang relatif sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
2. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
3. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam.
4. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur geneologis maupun dalam alur organisatoris. (Kusumohamidjojo dalam Handoyo,dkk.2015).

Mutakin, dkk (dalam Handoyo,dkk.2015) menyebutkan 3 (tiga) ciri yang menandai suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pada kelompok masyarakat terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar.
2. Individu-individu tersebut harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama diantara mereka minimal satu tingkatan interaksi.

### **C. Konsep Pariwisata**

Menurut Undang-Undang No. 10/2009 Tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata atau *tourism* menurut Organisasi Pariwisata Dunia adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan dengan membuat perencanaan dan persiapan, perjalanan dilakukan oleh turis atau wisatawan sejauh 15 mil (80 Km) dari rumah dengan rekreasi atau liburan. Definisi yang lebih lengkap, *tourism* adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti Bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya. (Susanto,2015).

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang penting dan mempunyai potensi serta peluang yang besar untuk dikembangkan. Perkembangan pariwisata diharapkan dapat menghambat penduduk desa untuk bermigrasi ke kota, membantu menyamakan peluang ekonomi,

khususnya di Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya. Perkembangan pariwisata juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, melalui pengembangan pariwisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian. (Evita, dkk dalam Prafitri, 2016).

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai efek yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. (Pitana,2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam (Andini 2017), terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

1. Wisatawan

Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan meningkatkan masa-masa didalam kehidupan.

## 2. Elemen Geografi

Peregerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi seperti di bawah ini:

- a. Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari Daerah Asal Wisatawan (DAW), seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b. Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah tujuan. Namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan Daerah Transit (DT) sangat penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan daerah tujuan.
- c. Daerah Tujuan Wisata (DTW), daerah ini sering dikatakan *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di Daerah Tujuan Wisata (DTW) ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat untuk menarik wisatawan, Daerah Tujuan Wisata (DTW) merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari Daerah Asal Wisatawan (DAW). Daerah Tujuan Wisata (DTW) juga merupakan *raison d'etre* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

### 3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis didalam kepariwisataan dan tersebar diketiga area geografis tersebut. Sebagai contoh, biro perjalan wisata bisa ditemukan didaerah asal wisatawan. Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisata maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Adapun asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, dan asas kesatuan.
- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi, dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Tujuan Kepariwisataan meliputi:
  - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  - 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  - 3) Menghapus kemiskinan.
  - 4) Mengatasi pengangguran.
  - 5) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.

- 6) Memajukan kebudayaan.
- 7) Mengangkat citra bangsa.
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 9) Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa.

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Salah satu dasar bagi kepariwisataan adalah obyek dan daya tarik wisata, karena kepariwisataan akan sulit dikembangkan jika tidak ada obyek dan daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata juga merupakan alasan yang membuat wisatawan atau pengunjung tertarik untuk berwisata ke suatu daerah atau tempat wisata. Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, suatu obyek pariwisata harus memenuhi kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung yaitu:

- a. *Something to see* / sesuatu untuk dilihat, adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang dapat menarik perhatian atau yang bisa dilihat oleh wisatawan, dengan kata lain daerah wisata tersebut harus mempunyai daya tarik tersendiri yang berbeda dengan objek wisata lain sehingga mampu untuk menarik perhatian turis atau pengunjung untuk berkunjung ke daerah wisata tersebut.
- b. *Something to do* / sesuatu untuk dilakukan, karena tujuan berwisata adalah untuk berlibur atau rekreasi, meninggalkan dan melupakan

kegiatan sehari-hari, maka daerah wisata harus menawarkan hal-hal baru dan berbeda yang dapat dilakukan oleh wisatawan atau pengunjung, seperti tempat makan yang menyediakan makanan khas dari daerah tersebut, arena bermain yang aman untuk anak-anak, wahana yang memacu adrenalin, serta panorama alam yang membuat pengunjung tertarik dan lebih betah untuk berkunjung ke daerah wisata tersebut.

- c. *Something to buy* / sesuatu untuk dibeli adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga dijadikan oleh-oleh (Yoeti dalam Bungin. 2015).

#### 4. Komponen Pariwisata

Pariwisata modern diklasifikasikan dalam beberapa komponen penting, yaitu:

- a. Destinasi
- b. Transportasi
- c. Pemasaran Wisata
- d. Sumber Daya. (Bungin,2015).

Dalam perspektif lain, pemerintah Indonesia mengklasifikasikan komponen pariwisata kedalam beberapa bagian penting seperti:

- a. Industri Pariwisata
- b. Destinasi Pariwisata
- c. Pemasaran Pariwisata
- d. Kelembagaan Pariwisata. (Bungin,2015).

Sedangkan Johnpul (dalam Bungin,2015) mengatakan komponen utama pariwisata terdiri dari:

- a. Aksesibilitas
- b. Akomodasi
- c. Atraksi.

Adapun menurut Ramesh (dalam Bungin,2015) komponen pariwisata terpenting adalah:

- a. Akomodasi
- b. Aksesibilitas
- c. Fasilitas
- d. Atraksi
- e. Aktivitas.

#### **D. Konsep Pengembangan Pariwisata**

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam upaya peningkatan potensi pariwisata hal yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan dan pengembangan wisata, serta membuat inovasi-inovasi yang lebih baik dari sebelumnya.

3 (tiga) prinsip utama dalam *Sustainability Development* (McIntery dalam Hidayat,2011):

- a. *Ecological Sustainability* / Keberlanjutan Ekologis, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.
- b. *Social and Cultural Sustainability* / Keberlanjutan Sosial dan Budaya, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
- c. *Economic Sustainability* / Keberlanjutan Ekonomi, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan dimasa mendatang.

Berhasil tidaknya suatu pengembangan objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata yang baik sangat tergantung pada 3A yaitu: Atraksi (*Attraction*), mudah dicapai (*Accessibility*), dan fasilitas (*Amenities*).

Adapun hal yang harus dilakukan dalam kegiatan pengembangan pariwisata terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b. Jasa Boga dan Restoran, industri jasa dibidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak dibidang angkutan darat, laut dan udara.
- d. Atraksi Wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.

- e. Cenderamata (*Souvenir*), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawah oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.
- f. Biro Perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali. Yunitasari.dkk (2014)

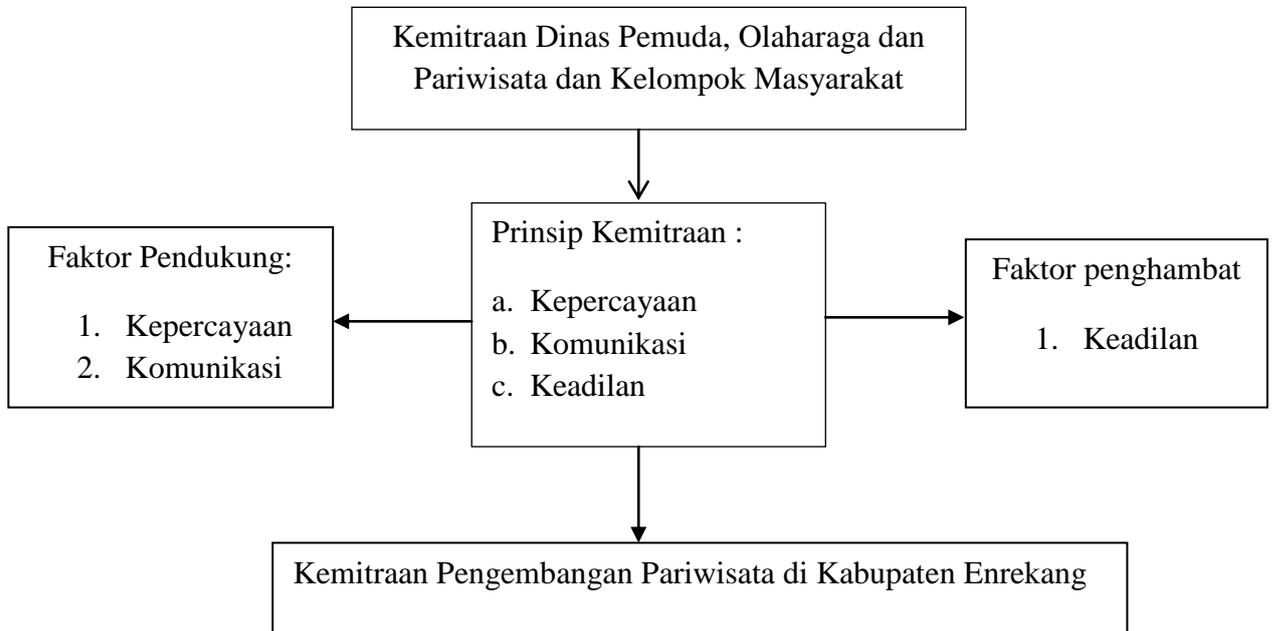
### **E. Kerangka Fikir**

Pariwisata sedang menjadi primadona dalam dunia industri dewasa ini, pariwisata akan memberikan wajah baru yang lebih menyenangkan bagi suatu daerah. Kabupaten Enrekang memiliki potensi daya tarik wisata, baik itu alam maupun budaya yang terbilang cukup banyak dan tersebar hampir disetiap wilayah kecamatan, tentu dapat menunjang sumber Pendapat Asli Daerah (PAD), dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat apabila dikembangkan secara maksimal dan profesional.

Konsep matang, strategi dan kesiapan setaip Stakeholders sebagai faktor pendukung yang dapat menopang berhasilnya kemitraan dalam pengembangan pariwisata untuk menarik perhatian wisatawan serta mengatasi adanya faktor penghambat yang dapat mengganggu pengembangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang.

Dalam melakukan Kemitraan untuk mengembangkan pariwisata ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni: Kepercayaan, Komunikasi, dan Keadilan. Yang akan digambarkan lebih jelas pada bagan kerangka fikir dibawah ini:

### Bagan I : Kerangka Fikir



### F. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tentang Kemitraan Dinas Pariwisata dan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang. Maka fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang. Serta Faktor-faktor pendukung dan Penghambat dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

### G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, dalam penelitian Kemitraan Dinas

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

2. Kemitraan pengembangan pariwisata ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:
  - a. Kepercayaan, seseorang akan bekerjasama dengan pihak atau orang lain tentunya harus memiliki mitra yang dapat dipercaya yang telah melalui proses uji kelayakan mitra, karena kepercayaan merupakan modal utama dalam bermitra yang lahir dan dibangun dari pengalaman, bukan secara dadakan serta tidak muncul begitu saja. Kepercayaan dimunculkan dari proses yang mungkin dari waktu yang singkat bahkan bisa pula dari waktu yang lama.
  - b. Komunikasi yang terbuka. Dikarenakan kerjasama didasarkan atas kepentingan kedua belah pihak, maka kerjasama harus ada komunikasi yang terbuka antar keduanya. Komunikasi kedua belah pihak penting, mengingat dalam bermitra memerlukan banyak informasi untuk menunjang kepentingan bersama. Pertukaran informasi dan diskusi kedua belah pihak mengenai usaha bersama yang dijalankan tidak mungkin terjadi jika salah satu pihak menutup diri atau kurang terbuka. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan.
  - c. Dalam kerjasama tentunya harus ada keadilan dari kedua belah pihak. Artinya bahwa bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka bukan hanya satu pihak saja yang harus menanggung kerugian tersebut,

dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian adil memunjukkan sikap tidak berat sebelah atau menggunakan/merugikan pihak lain.

3. Faktor pendukung oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata adalah faktor-faktor yang membantu ataupun menunjang keberhasilan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang. Adapun faktor-faktor pendukung dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata adalah : Kepercayaan dan Komunikasi
4. Faktor penghambat oleh Pemerintah Daerah Khusus Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata adalah faktor-faktor yang menghambat Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang. Adapun faktor penghambat dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yakni belum terlaksananya salah satu prinsip kemitraan yakni keadilan dengan baik.
5. Pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah terciptanya kawasan wisata yang memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat sekitar seperti menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), memajukan pertumbuhan suatu daerah, mampu menyejahterakan masyarakat sekitar tempat wisata serta terciptanya kenyamanan dan

kepuasan wisatawan, dengan tetap mempertahankan ekologi, sosial dan budaya serta ekonomi bagi kebutuhan mendatang di Kabupaten Enrekang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi**

Penelitian ini dilakukan selama 2 (Dua) bulan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Enrekang dan yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Objek Wisata Buttu Macca di Kabupaten Enrekang. Alasan penentuan lokasi karena sampai saat ini potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Enrekang belum seluruhnya disentuh dan dikembangkan dengan baik oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kelompok Masyarakat terkait secara langsung dengan judul penelitian penulis, yakni Kemitraan Dinas Pariwisata dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, metodologi kualitatif yakni penelitian yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu dan perilaku yang dapat diamati sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimana data yang diperoleh berupa data-data, gambaran, perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk angka melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau

frekuensi. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis/menyeluruh.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penggambaran suatu fenomena yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

## C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau dilapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah: hasil observasi, dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

## D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang dimana menganggap bahwa informan yang dipilih mengetahui

betul informasi dan memiliki data-data yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun informan dalam penelitian, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, Ketua Kelompok Kerja (POKJA), Pengelola Objek Wisata Buttu Macca Kabupaten Enrekang serta Masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Hamsir	HR	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang	1 orang
2	Zul	ZL	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	1 orang
3	Sabir	SR	Pengelola Objek Wisata Buttu Macca	1 orang
4	Ramli	RI	Pengelola Objek Wisata Buttu Macca	1 orang
5	Fajar	FR	Pengelola Objek Wisata Buttu Macca	1 orang
6	Aslan	AN	Masyarakat	1 orang
7	Akbar	AR	Masyarakat	1 orang
8	Syahril	SL	Masyarakat	1 orang
Total Informan				8 orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti berkunjung dan mengamati secara langsung objek wisata Buttu Macca yang ada di Kabupaten Enrekang.
2. Wawancara, yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan bebas dengan melakukan pertemuan dengan informan dan mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi, yaitu dengan penelusuran literatur berupa buku-buku, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (dalam Radu, 2015:45) terdapat tiga komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

## **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai cara sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya.

### 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3. Triangulasi Data

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.
- c. Triangulasi Waktu yaitu waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan. Sugiyono (2012).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang**

###### **a. Aspek Geografi dan Topografi**

Kabupaten Enrekang merupakan Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan.

Sejak abad XIV, daerah ini dikenal dengan nama Massenrempulu yang berarti daerah pegunungan atau daerah pinggiran gunung, sedangkan nama Enrekang Sendiri berasal dari Endeg yang memiliki arti naik dari atau memanjat inilah asal mula nama Endekan atau Enrekang. Hal tersebut karena  $\pm$  85% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang merupakan pegunungan dan bukit yang membentang mengelilingi Kabupaten Enrekang.

Topografi Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayaha topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 meter dari permukaan laut, serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung yaitu sekitar 84-96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim

kemarau, dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat Kecamatan maupun level Desa/Kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang terdapat 54 Desa/Kelurahan yang tersebar pada 5 Kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran Desa/Kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada Tahun 1997, jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 Desa/Kelurahan pada Tahun 1996, menjadi 108 Desa/Kelurahan.

Demikian halnya pada tingkat Kecamatan, yang pada awalnya hanya ada 5 Kecamatan mejadi 9 Kecamatan. Pada pertengahan Tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi 3 Desa sehingga menjadi 111 Desa/Kelurahan. Kemudian pada akhir 2006 terjadi lagi pemekaran Desa dan Kecamatan, menjadi 11 Kecamatan dan 112 Desa/Kelurahan. Terakhir pada Tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 Kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu  $392,87 \text{ km}^2$  atau 22 % dari luas Kabupaten Enrekang. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu  $34,66 \text{ km}^2$  atau 1,94% dari luas Kabupaten Enrekang.

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah Utara ke Selatan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut memagarai Kabupaten Enrekang di sebelah Timur, sedang di sebelah Barat

membentang sungai Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi, Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana. Sedangkan KTE meliputi, Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih  $659,03 \text{ km}^2$  atau 36,09% dari luas Kabupaten Enrekang. Sedangkan luas KTE kurang lebih  $1.126,98 \text{ km}^2$  atau 63,10% dari luas Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktivitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri hasil pertanian berpotensi dikembangkan didaerah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi. Sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga potensi untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pemekaran dari lima Kecamatan menjadi sembilan Kecamatan di Kabupaten Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan

pemerintahan lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin dekatnya pusat pemerintah Kecamatan dari Desa-Desa bawahannya. Selain itu jumlah penduduk beserta aktivitasnya yang akan ditangani setiap wilayah semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan sehingga akan memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan disetiap wilayah.

Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensinya memberikan peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya keterbatasan akses KTE terhadap KBE mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah-langkah strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi daerah.

#### b. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki wilayah seluas 1.789,01  $km^2$ . Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 2,83%. Dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

**Tabel 4.I** Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Enrekang

Sebelah Utara	Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur	Kabupaten Luwu dan Sidrap
Sebelah Selatan	Kabupaten Sidrap
Sebelah Barat	Kabupaten Pinrang

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018, BPS Enrekang

Secara administratif Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 Kecamatan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 129 wilayah Desa/Kelurahan. Rincian luas masing-masing Kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

Tabel 4.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

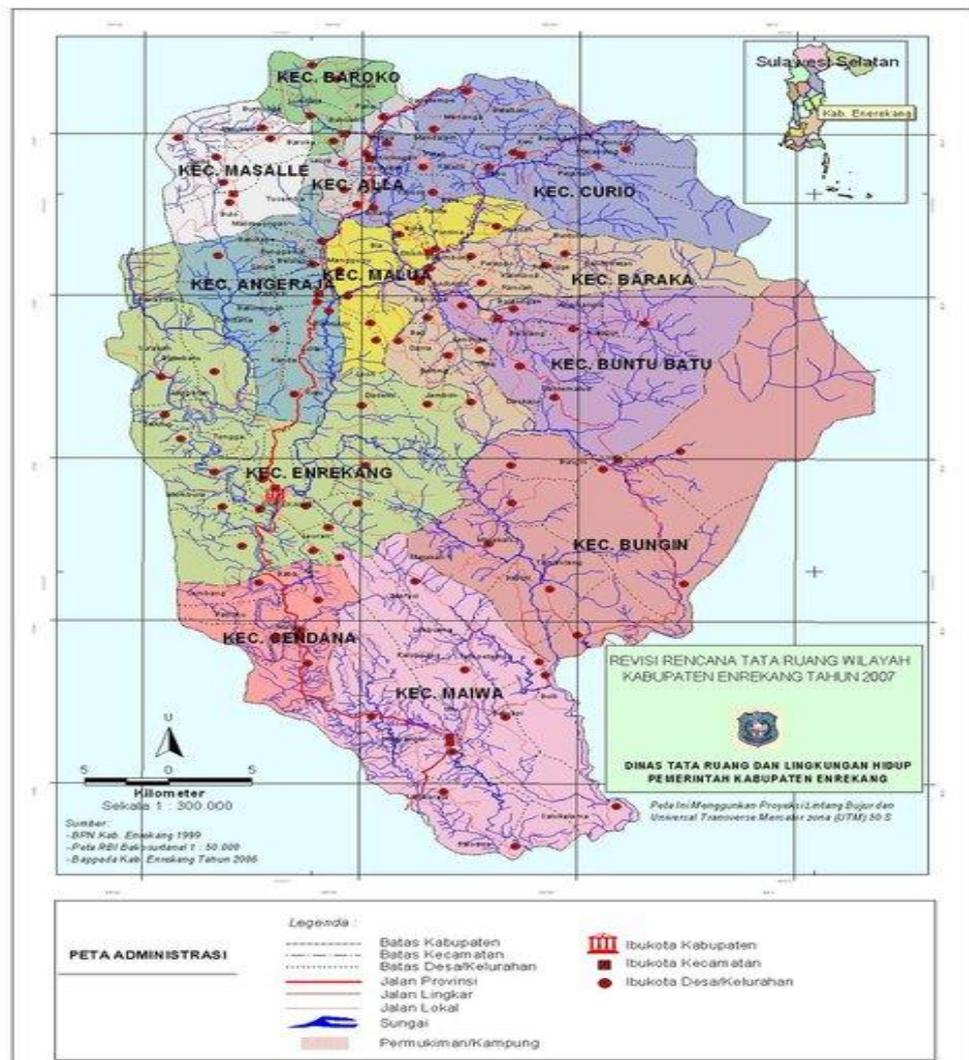
No	Nama Kecamatan	Luas Area ( $km^2$ )	Persentase Terhadap Luas Enrekang (%)
1	Maiwa	392,87	22,00
2	Bungin	236,84	13,26
3	Enrekang	291,19	16,30
4	Cendana	91,01	5,10
5	Baraka	159,15	8,91
6	Buntu Batu	126,65	7,09
7	Anggeraja	125,34	7,02
8	Malua	40,36	2,26
9	Alla	34,66	1,94
10	Curio	178,52	9,99
11	Masalle	68,35	3,83
12	Baroko	41,08	2,30
Kabupaten Enrekang		1,786,01	100

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018, BPS Enrekang

Dari Tabel, terlihat bahwa Kecamatan Maiwa memiliki daerah terluas yakni sebesar  $392,87 km^2$  (22%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Alla sebesar  $34,88 km^2$  (1,94%).

Secara administratif, 12 Kecamatan dan dan 129 Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 1: Peta Adminstrasi Kabupaten Enrekang



Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018

### c. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3° 50'00" Lintang selatan dan antara 109° 40'53" -120° 6'33" Bujur Timur. Letak

geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jasilah Sulawesi Selatan yang ada dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung.

d. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2018 adalah sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan.

**Tabel 4.3** Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Kepadatan Penduduk
1	Maiwa	11.655	11.657	23.312	59,3
2	Bungin	2.284	2.098	4.382	18,5
3	Enrekang	14.928	14.929	29.857	102,5
4	Cendana	4.269	4.420	8.689	95,5
5	Baraka	10.495	10.287	20.782	130,6
6	Buntu Batu	6.097	5.896	11.933	94,7
7	Anggeraja	11.866	11.850	23.716	189,2
8	Malua	4.275	4.322	8.597	213,0
9	Alla	10.107	10.046	20.153	581,4
10	Curio	7.248	7.094	14.342	80,3
11	Masalle	6.145	5.953	12.098	177,0
12	Baroko	5.184	4.965	10.149	247,1
Kabupaten Enrekang		94.553	93.517	188.070	105,3

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018 BPS Enrekang

Berdasarkan tabel, Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena Kecamatan ini berada di ibu kota Kabupaten Enrekang dengan penduduk yang heterogen. Adapun

kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Bungin dengan jumlah penduduk sebesar 4.382 jiwa dan merupakan Kecamatan yang baru dimekarkan.

e. Pemerintahan

Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati sejak awal mulanya terbentuk yaitu pada Tahun 1960. Adapun Bupati yang pernah memegang tumpu pemerintahan di Kabupaten Enrekang adalah:

1. Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo
2. Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur
3. Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chalif Lasiny
4. Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soestrisna
5. Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA
6. Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud ( $\pm$  masa non aktif, dan PJS oleh Drs. A. Parawansa)
7. Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA
8. Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
9. Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M.Amien Syam
10. Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman
11. Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. Iqbal Mustafa
12. Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung
13. Periode 2008-2013 dijabat oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung
14. Periode 2013-sekarang dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd

f. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

1. Visi

Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi Pemerintah Kabupaten Enrekang yaitu **“Kabupaten Enrekang Sebagai Daerah Agropolitan Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”**.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, dukungan sarana dan prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah berbasis pada pengembangan sektor pertanian (*Resourch based Strategy*).

Dengan berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industri pengolahan, perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya.

2. Pengembangan daerah agropolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan.
3. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan

berkelanjutan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

4. Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LER) dan memberikan perhatian terhadap pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal.

## 2. Misi

Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah:

- a. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya sektor pertanian.
- b. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.

- c. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan Enrekang Timur (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang.
- d. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkoneksi antar wilayah.
- e. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

g. Tujuan

tujuan merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.
3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam Kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan berbagai pihak.

5. Meningkatkan pengolahan potensi di Kawasan Timur Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Terciptanya peraturan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

h. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Enrekang yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun sasaran pemerintah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan (transportasi dan postel).
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
6. Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi.
7. Terwujudnya pemberdayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

8. Terjalannya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan.
  9. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah Provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  10. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan.
  11. Meningkatnya kerjasama swasta dalam berbagai bidang.
  12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuaian lahan.
  13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
  14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
  15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
  16. Meningkatnya sosial masyarakat.
  17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
  18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
  19. Meningkatnya kualitas aparatur.
  20. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengadilan pembangunan.
  21. Meningkatnya wawasan kebangsaan.
  22. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban dengan masyarakat.
1. Potensi Unggulan Daerah
    - a. Potensi sektor pertanian dan Perkebunan

Potensi pertanian dan perkebunan masih sangat mendominasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Enrekang dengan kontribusi utama sub sektor tanaman pangan seperti padi, sayur mayor, dan buah-buahan, serta sektor perkebunan seperti kopi dan kakao.

#### b. Potensi Pertambangan dan Energi

Sesuai dengan data geologi pertambangan, Kabupaten Enrekang memiliki potensi endapan bahan tambang galian berupa emas dan perak, minyak bumi dan batu bara.

Disamping sumber daya mineral strategis dan vital, Kabupaten Enrekang juga memiliki potensi sumber bahan galian golongan C yang melimpah.

#### c. Potensi Sumber Daya Air

Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Enrekang cukup potensial dimanfaatkan untuk irigasi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 4 sungai besar, aliran sungai tersebut, disamping dimanfaatkan untuk sektor pertanian, khususnya untuk persawahan/irigasi, juga untuk keperluan lainnya. Seperti penyediaan air bersih untuk masyarakat sekitar dan untuk digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Enrekang sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang hampir merata pada setiap tahunnya dengan rata-rata curah hujan 1.410 mm/Tahun atau 137 hari hujan.

#### d. Potensi Perikanan dan Peternakan

Potensi peternakan yang ada di Kabupaten Enrekang pada dasarnya memiliki prospek pengembangan yang potensial, prospek pengembangan sub sektor peternakan meliputi ternak sapi, kuda, kerbau, kambing dan terbak kecil meliputi ayam ras dan ayam buras, ayam broiler serta itik. Populasi sapi yang terdata terdiri dari, sapi potong sebanyak 30.168 ekor, sapi perah sebanyak 1.508 ekor. Populasi kerbau terdata 2,641 ekor. Populasi kuda yang sempat terdata mencapai 981 ekor. Populasi kambing mencapai 34.941 ekor.

Untuk ternak kecil, prospek pengembangan pada ayam kampung (buras) dan ayam ras. Populasi ayam buras di Kabupaten Enrekang yang terdata yakni 131.941 ekor, ayam ras sebanyak 181.335 ekor.

Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Enrekang, termasuk budidaya ikan sawah, kolam dan penangkaran disungai, secara keseluruhan mencapai kurang lebih 137,67 ton/tahun dengan luas areal kurang lebih 808 ha.

## **2. Gambaran Umum Objek Wisata Buttu Macca**

Objek wisata Buttu Macca terletak di Dusun Pulauan, Desa Pattondonsalu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Kecamatan Anggeraja merupakan bagian wilayah Kabupaten Enrekang yang terletak diwilayah utara Kabupaten Enrekang, sekaligus berperan sebagai salah satu

penyangga Kabupaten Enrekang dimana dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sedangkan Desa Pattondonsalu yang wilayahnya merupakan jalur utama menuju daerah Tanah Toraja dan startegis pada jalur tengah di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan data statistik luas wilayah Desa Bambapuang adalah 9,2 km. Secara administartif Desa Bambapuang masuk wilayah Kecamatan Anggeraja yang sebelah Timur berbatasan dengan Tokkonan, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mendante, sebelah Barat berbatasan dengan Buttu Batu, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tindalun.

Secara umum kawasan Desa Pattondonsalu memiliki banyak spot-spot destinasi wisata yang jika dikelola secara baik dan professional akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi masyarakat dan jika pemerintah Kabupaten Enrekang mampu mengelola secara maksimal objek-objek wisata ini maka telah pasti mendatangkan sumber pajak yang besar bagi daerah. Salah satunya adalah objek wisata Buttu Macca.

Untuk kondisi geologi yang ada pada setiap objek wisata ditentukan berdasarkan letak lokasi wisata. Keberadaan struktur geologi pada setiap objek wisata menunjang dari segi aspek daya tarik terhadap objek wisata terutama jenis wisata alam. Salah satunya objwk wisata Buttu Macca, Wisata ini berjaraka sekitar 15 km dari Kota Enrekang atau 245 km dari Kota Makassar. Objek wisata Buttu Macca ini berjarak 500 meter dari penginapan Villa Bambapuang sehingga pengunjung yang ingin menikmati wisata dapat

beristirahat di Villa tersebut sambil memanjakan mata dengan pemandangan Gunung Nona yang ada di depan Villa Bambapuung.

Lokasi objek wisata Buttu Macca terletak di jalan poros Enrekang-Toraja. Objek wisata Buttu Macca mulai dibuka untuk umum pada Tahun 2016, luas objek wisata Buttu Macca mulai dari gerbang hingga spot ujung sekitar  $\pm$  300 meter. Jarak objek wisata Buttu Macca dari jalan poros sekitar 200 meter. Untuk sampai ke spot-spot dan wahana-wahana yang ada di Buttu Macca pengunjung harus berjalan sekitar 100 meter dari tempat parkir.

Sejak awal dibuka pada Tahun 2016 sampai sekarang pengelola Objek Wisata Buttu Macca ini berjumlah sekitar 20 orang yang tergabung dari pemuda setempat, pihak BUMDES dan. Dalam hal jumlah kunjungan sejak Tahun 2016 hingga sekarang objek wisata Buttu Macca ini terus mengalami kenaikan jumlah pengunjung, terutama diakhir pekan, hari libur nasional dan hari libur panjang anak sekolah. Pengunjung objek wisata Buttu Macca ini pun beragam mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, pengunjung pun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Biasanya di akhir pekan objek wisata Buttu Macca ramai dikunjungi oleh anak-anak remaja yang bersekolah disekitar objek wisata Buttu Macca ini

Di Kabupaten Enrekang sendiri terdapat kurang lebih 15 Objek Wisata yang sudah dibuka untuk umum yakni sebagai berikut:

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Kebun Massenrempulu	Dusun Buttu Kuang, Kec. Maiwa
2	Permandian Lewaja	Bisang, Kel. Lewaja Kec. Enrekang
3	Hutan Pinus Baredok	Dusun Pasongken, Desa Buntu Mondong
4	Air Terjun Lagandang	Dusun Benteng Banua Desa. Bambapuung

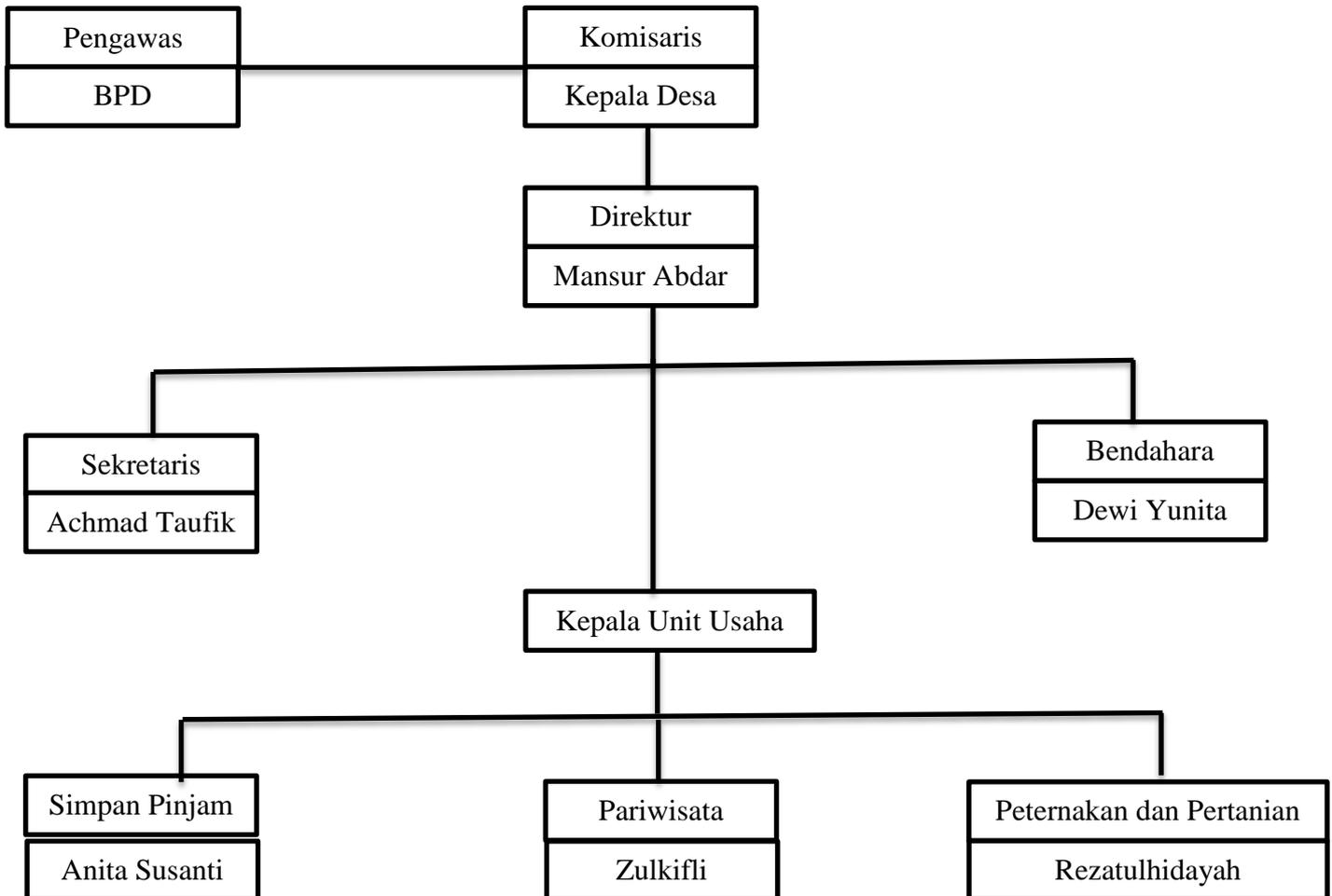
5	Air Terjun Kajejen	Bisang, Lewaja, Kec. Enrekang
6	Air Terjun Laburan	Dusun Singki, Kec. Anggeraja
7	Waterbak Matua	Matua, Kec. Alla
8	Dante Pine	Tanete, Kec. Anggeraja
9	Buntu Sumbang	Kel. Mataran, Kec. Anggeraja
10	Buttu Gigi	Desa Tindalun, Kec. Anggeraja
11	Mata Dewa	Mata Dewa, Kec. Enrekang
12	Buttu Macca	Kotu, Kec. Anggeraja
13	Cekong Hill	Cakke, Kec. Anggeraja
14	Bukit Butu Tande	Desa Kumandang, Kec. Enrekang
15	Bukit Miallo	Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Enrekang Tahun 2018

**Tabel 4.4 : Jumlah Pengelola Buttu Macca**

No	Nama	Jabatan
1	Zulkifli	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)
2	Sabir	Pengelola
3	Ramli	Pengelola
4	Fajar Indrawan	Pengelola
5	Hasrul. J	Pengelola
6	Akbar Jasman	Pengelola
7	Yudi Bakri	Pengelola
8	Andika	Pengelola
9	Hasrul Darmansyah	Pengelola
10	Fadli Ariandi	Pengelola
11	Muhammad Asril	Pengelola
12	Diky Wahyudi	Pengelola
13	Syam Muzakkar	Pengelola
14	Hayrul	Pengelola
15	Muhammad Faiz	Pengelola
16	Asman Abdul Hakim	Pengelola
17	Muh. Anugrah	Pengelola
18	Agung Darmawan	Pengelola
19	Ibnu Zulkifli	Pengelola
20	Surasman	Pengelola

Sumber: BUMDes Pattondonsalu, Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja Tahun 2016

**Gambar 4.2 : Struktur BUMDes Pattondonsalu**

**Tabel 4.5 : Jumlah Pengunjung Objek Wisata Buttu Macca 2016-2018**

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2016	1.702 orang
2	2017	1.872 orang
3	2018	1,987 orang

Sumber: BUMDes Pattondonsalu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Jumlah wahana yang ada di objek wisata Buttu Macca sejak awal dibuka hingga saat ini ada 4(empat) wahana. Wahana-wahana ini sangat cocok untuk pengunjung yang suka tantangan dan tidak takut ketinggian. Selain itu juga terdapat spot-spot foto yang berjumlah 14 spot foto. Untuk memasuki objek wisata Buttu Macca pengunjung dikenakan biaya 2000,-/orang, sedangkan untuk menaiki wahana yang ada di objek wisata Buttu Macca dikenakan biaya 20.000,00 untuk wahana Ayunan Ketapel dan Sepeda Gantung. sedangkan 25.000,00/orang untuk wahana Flying Fox dan Lazy Bag. untuk spot foto sendiri 2.000,-/orang disetiap spot foto. Yang kemudian hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian kemitraan atau MOU pada Pasal 7 yakni 20% untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 50% untuk BUMDes dan 30% untuk pihak pengelola Buttu Macca.

**Tabel 4.6 : Wahana dan Spot Foto di Buttu Macca**

No	Nama Wahana/Spot Foto	Tahun
1	Wahana Ayunan Ketapel	2016
2	Spot foto sarang telur naga	2016
3	Spot Foto Gerbang Cinta	2016
4	Spot Foto Haluan Kapal	2016
5	Spot Foto Jalan Setapak	2016
6	Wahana Flying Fox	2017
7	Spot Foto Perahu	2017
8	Spot Foto Sofa	2017

9	Spot Foto Love	2017
10	Spot Foto Piano	2017
11	Wahana Sepeda Gantung	2018
12	Spot Foto Ayunan Jomblo	2018
13	Spot Foto Figura	2018
14	Spot Foto Ranjang Pengantin	2018
15	Spot Foto HastagExploreEnrekang	2018
16	Wahana Lazy Bag	2018
17	Spot Foto Pesawat	2018
18	Spot Foto Bintang	2018

Sumber: BUMDes Pattondonsalu, Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja

**Gambar 4.3** : wahana yang ada di objek wisata Buttu Macca



### 3. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang

#### a. Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga Pariwisata Kabupaten Enrekang

##### 1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang akan dicapai oleh sebuah organisasi berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, dan dalam rangka menunjang pencapaian Visi Kabupaten Enrekang.

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan

fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah maupun upaya mencapai kinerja pembangunan daerah aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merumuskan visi OPD periode tahun 2014-2018 yaitu **“Terwujudnya Sumber Daya Pemuda Dan Olahraga Yang Unggul, Serta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Maju, Aman Dan Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2018”**.

Adapun makna visi Tersebut adalah:

- a. Sumber daya pemuda dan olahraga, artinya keseluruhan potensi kepemudaan dan keolahragaan yang dapat berbentuk kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya modal, kemitraan *stakeholder*, maupun ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Unggul artinya suatu gambaran kondisi akhir dari implementasi program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Daerah tujuan wisata artinya kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi kepariwisataan.

- d. Maju artinya dimaksudkan bahwa Kabupaten Enrekang mampu mengangkat dan menonjolkan keunggulan hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah lainnya.
- e. Aman artinya keadaan sentosa, selamat mampu menghadapi segala macam gangguan.
- f. Sejahtera artinya keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
- g. Berwawasan lingkungan artinya pengelolaan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Adapun misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah

- a. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- b. Peningkatan kualitas pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.
- c. Pengembangan sumber daya olahraga melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan pariwisata.
- e. Pengelolaan objek wisata secara professional.

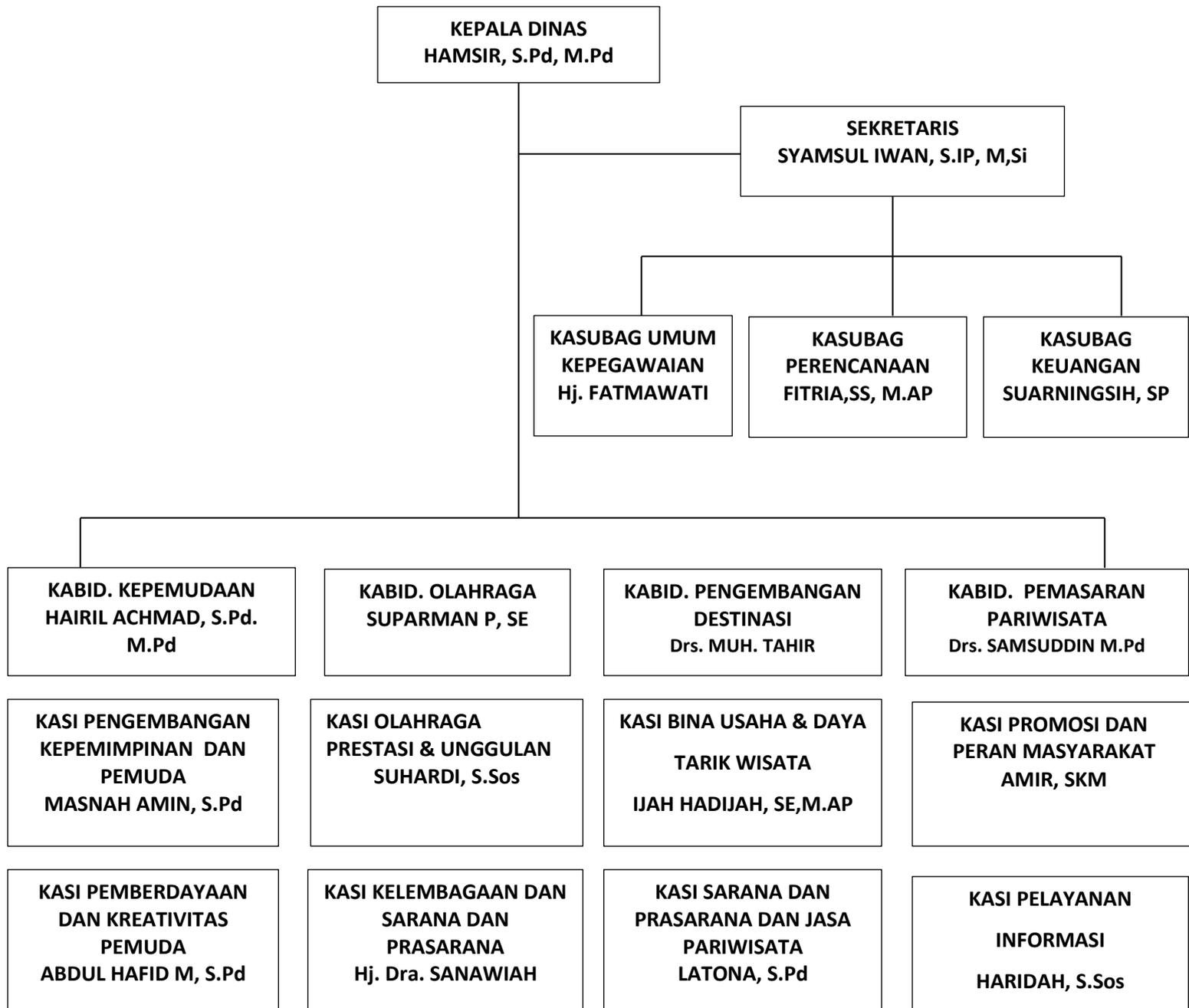
Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kepemudaan
  1. Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Pemuda
  2. Seksi Pemberdayaan dan Kraetifitas Pemuda
- d. Bidang Olahraga
  1. Seksi Olahraga, Prestasi dan Unggulan
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengembangan Destinasi
  1. Seksi Bina Usaha dan Daya Tarik Wisata
  2. Seksi Sarana dan Prasarana dan Jasa Pariwisata
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata
  1. Seksi Promosi dan Peran Masyarakat
  2. Seksi Pelayanan dan Informasi

**Gambar 4.4** Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Enrekang



## **B. Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang**

Kemitraan pada esesinnya diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama antara berbagai pihak atau gotong royong baik itu secara perorangan maupun kelompok. Menurut Notoadmodjo dalam (Raman, 2015:190) kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan tugas bersama yang telah disepakati.

Pariwisata memang merupakan sector yang multidimensi. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam upaya pembangunan dan mengembangkan Kepariwisata disuatu daerah, bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh *stakeholders* yang ada. Dalam konsep manajemen kepariwisataan, ada dua pilar yang menjadi motor penggerak dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan, yaitu pemerintah dalam hal ini yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan kelompok masyarakat. Kesinergisan peran antara kedua *stakeholders* tersebut sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance*, yang mana dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Tetapi lebih menggambarkan adanya pola kerjasama yang baik antara semua elemen yang ada, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat mengingat

adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bila melakukan pengembangan secara sepihak.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal I, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata seperti pembangunan dan pengembangan dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan orang dan Negara. Serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dari Undang-undang ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi pariwisata dalam wilayah mereka, sehingga dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar sehingga dalam hal ini pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan.

Berdasarkan perjanjian kemitraan antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pattondonsalu Tentang Pengelolaan Objek Wisata Buttu Macca Nomor: 287.b/DISPOPAN ENREKANG/XI/2015 dan Nomor: 28.b/BUMDes Pattondonsalu/XI/2015.

Salah satu konsep dan cara yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata adalah dengan kemitraan atau kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat, hal ini dikarenakan konsep matang dari perencanaan pariwisata tentu harus didukung oleh kesiapan *stakeholders*.

Pariwisata melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya, menyentuh banyak aspek dan turut membawa unsur-unsur pariwisata untuk terlibat didalamnya pengembangannya. Kemitraan antara aktor perlu dirancang serta dijalin secara matang dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang.

Kemitraan mempunyai sifat mendasar yaitu prinsip yang menjadi ciri dasar dari kemitraan. Dengan kata lain kemitraan mempunyai prinsip yang dijadikan dasar etika dan ukuran dalam kerjasama atau kemitraan yang harus diperhatikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam melakukan Kemitraan untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang (Takbir, dalam Raman dkk,2015:191), yaitu:

#### 1. Kepercayaan

Seseorang yang akan bekerjasama dengan pihak atau orang lain tentunya harus memiliki mitra yang dapat dipercaya yang telah melalui proses uji kelayakan mitra, karena kepercayaan merupakan modal utama dalam berbisnis yang lahir dan dibangun dari pengalaman, bukan secara dadakan serta tidak muncul begitu saja. Kepercayaan dimunculkan dari proses yang mungkin dari waktu yang singkat bahkan bisa pula dari waktu yang lama. Sebagai mana wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

“Kepercayaan yang terbangun antara pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat terbukti dengan tetap dibolehkannya kelompok masyarakat atau pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan objek wisata Buttu Macca walaupun belum adanya surat izin legalitas untuk

mengelola objek wisata tersebut, dengan tetap memberikan pengawasan dan pembinaan”. (Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola objek wisata Buttu Macca yang mengatakan:

“Dalam kemitraan kami dengan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Buttu Macca ini didasari dengan saling percaya antara ini dikarenakan kami pihak pengelola bisa menjaga kawasan hutan ini dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan”. (Wawancara RI, 18 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kepercayaan antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah terlaksana dan terbangun dengan baik. Hal ini terbukti dengan tetap memberi izin dan pengawasan untuk mengelola objek wisata Buttu Macca walaupun belum ada izin secara legal, dengan pertimbangan pihak pengelola selalu menjaga kawasan hutan tempat wisata tersebut.

## 2. Komunikasi

Komunikasi yang terbuka merupakan salah satu prinsip kemitraan, dikarenakan kerjasama didasarkan atas kepentingan kedua belah pihak, maka kerjasama harus ada komunikasi yang terbuka antar keduanya. Komunikasi kedua belah pihak penting, mengingat dalam bermitra memerlukan banyak informasi untuk menunjang kepentingan bersama. Pertukaran informasi dan diskusi kedua belah pihak mengenai usaha bersama yang dijalankan tidak mungkin terjadi jika salah satu pihak menutup diri atau kurang terbuka. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka merupakan salah satu prinsip dasar yang

harus dilakukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Komunikasi yang kami lakukan dalam hal pembinaan kami selaku pihak pemerintah selalu memberikan arahan serta menerima masukan dari kelompok masyarakat terkait pengembangan pariwisata Buttu Macca, dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu pihak pemerintah juga biasanya melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi objek wisata Buttu Macca”.(Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Hal tersebut juga senada dengan wawancara peneliti dengan pihak pengelola Buttu Macca yang mengatakan:

“Sejauh ini komunikasi yang dibangun yakni melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi kami disini serta melakukan diskusi ringan tentang hal-hal dan strategi-strategi yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata Buttu Macca. Selain itu pemerintah selalu terbuka jika mengadakan pelatihan atau pembinaan mengenai pengembangan pariwisata. dalam melakukan komunikasi ini kami sangat terbantu dengan adanya media sosial” (Wawancara FR, 18 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah prinsip kemitraan yakni komunikasi dalam kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan kelompok masyarakat dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah dilakukan sehingga kemitraan inipun berjalan dengan baik. Beberapa cara yang dilakukan untuk terus menjalin dan menjaga komunikasi yang terbuka antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan pihak kelompok masyarakat dengan cara melakukan kunjungan langsung ke objek wisata Buttu Macca, melakukan diskusi-diskusi terkait strategi-strategi yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata Buttu Macca, serta adanya saling keterbukaan informasi dalam

hal memberikan pelatihan-pelatihan, komunikasi ini juga sangat terbantu dengan adanya media sosial.

### 3. Keadilan

Dalam melakukan kerjasama atau kemitraan tentunya harus ada keadilan dari kedua belah pihak. Artinya bahwa bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka bukan hanya satu pihak saja yang harus menanggung kerugian tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian adil menunjukkan sikap tidak berat sebelah atau merugikan satu pihak. Namun dalam kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat prinsip ini belum terlaksana dengan baik. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam wawancara dengan peneliti mengatakan:

“Dalam beberapa hal kami pihak Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum bisa memberikan bantuan jika terjadi suatu kerugian dan hal-hal fatal di wahana-wahana yang ada di Buttu Macca kami tidak ikut bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan belum adanya izin legalitas dalam pengelolaan objek wisata Buttu Macca.” (Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pengelola objek wisata Buttu Macca yang mengatakan :

“Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pengunjung dalam mencoba wahana-wahana yang ada di objek wisata Buttu Macca atau hal pengelolaan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab kami pihak pengelola bersama dengan Kelompok Kerja (POKJA) dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pulauan.” (Wawancara SR, 18 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat prinsip keadilan belum terlaksana. Hal tersebut karena belum adanya surat izin legalitas secara tertulis untuk mengelola objek wisata Buttu Macca sehingga pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum berani mengambil resiko dalam hal menanggung kerugian yang terjadi. sepenuhnya di serahkan kepada pihak pengelola dan pihak BUMDES untuk kemudian dikelola untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata Buttu Macca.

Dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang, juga terdapat bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran kemitraan serta untuk mendukung dan membantu pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan objek wisata Buttu Macca. Bentuk-bentu kemitraan tersebut yakni:

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata , dijelaskan tentang:

“bentuk kemitraan antar pemerintah dan masyarakat yaitu dengan melakukan pembinaan atau mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata”.(Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Pernyataan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan pihak pengelola objek wisata Buttu Macca yang mengatakan :

“Dalam upaya pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melibatkan kami secara langsung seperti memberikan pembinaan dan sosialisasi-sosialisasi terkait upaya-upaya yang akan ditempuh untuk terus mengembangkan pariwisata di Kabupaten Enrekang. (Wawancara SR, 18 Agustus 2018).

Pernyataan Kepala Dinas dan pihak pengelola di atas juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pihak masyarakat sekitar objek wisata Buttu Macca yang mengatakan:

“Selain itu Pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pun melibatkan langsung pihak masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan ditempat-tempat wisata guna membangun kreativitas serta menjalin hubungan yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat, selain itu juga guna mengembangkan potensi-potensi pemuda yang ada di Kabupaten Enrekang”.(Wawancara AN, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kemitraan yang di bangun oleh pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat, melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan objek wisata yang ada dengan tujuan menjalin hubungan kerjasama yang baik serta membangun potensi-potensi dan kreativitas-kreativitas masyarakat di Kabupaten Enrekang.

## 2. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)

Kelompok Kerja (POKJA) adalah kelompok yang dipilih dan dibentuk langsung oleh Kepala Dinas, Ketua atau Manager Organisasi yang

kemudian akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan. Kelompok Kerja (POKJA) juga bertanggung jawab membantu terwujudnya suatu tujuan dari organisasi-organisasi, untuk membantu Kepala atau Manager dalam menyelesaikan persoalan-persoalan khusus dalam organisasi. Hal ini senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Adapun cara yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata selain pembinaan masyarakat juga membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang kemudian akan membantu pihak pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata serta membantu mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata”.(Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Ketua Kelompok Kerja (POKJA) di Desa Pulauan dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan:

“Kelompok Kerja (POKJA) merupakan bawahan Dinas yang bertugas membantu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang. Di Desa Pulauan sebagai Kelompok Kerja (POKJA) adalah pengurus BUMDES yang kemudian akan bahu membahu dalam mengembangkan objek wisata di Kecamatan Anggeraja salah satunya adalah objek wisata Buttu Macca”.(Wawancara ZL, 16 Agustus 2018).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Kerja (POKJA) merupakan salah satu bentuk kemitraan yang sangat membantu kelancaran kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang. Karena POKJA ini sangat membantu Dinas terkait dalam

melakukan tugasnya dalam kemitraan dengan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Buttu Macca. Selain itu POKJA juga membantu pemasukan BUMDES sehingga dapat saling menguntungkan dan terdapat prinsip keadilan antara pihak Kelompok Kerja dengan pihak pengelola objek wisata Buttu Macca.

Dalam teori kemitraan, Adisasmita mengungkapkan bahwa syarat dasar kemitraan adalah adanya prinsip yang saling menguntungkan (win-win solution). Dari persyaratan dasar kemitraan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa telah diterapkan prinsip saling menguntungkan (win-win solution) dalam kemitraan yang sudah dijalankan pada pengembangan Destinasi Wisata Buttu Macca. Keuntungan yang diperoleh pemerintah dari adanya kemitraan yaitu dibantu dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Pattondonsalu dan mampu mengurangi jumlah kemiskinan serta pengangguran di desa, terbantu dalam melakukan pengembangan dalam bidang pariwisata dengan adanya kebijakan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap kecamatan yang kemudian membantu dalam mengembangkan destinasi-destinasi wisata di setiap kecamatan. lalu bagi kelompok masyarakat yang bermitra keuntungan yang didapat yaitu pemasukannya bertambah dengan adanya penggunaan lahan sebagai lahan parkir dan juga masyarakat tersebut mendapat pekerjaan yang nantinya ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan masyarakatnya juga dibina dalam pelatihan berbahasa inggris yang

diadakan rutin setiap tahun oleh Pemerintah yang diaplikasikan langsung kepada masyarakat Kabupaten Enrekang. Lalu untuk BUMDes mendapat pemasukan dari karcis, wahana dan spot foto yang ada di Buttu Macca.

### **C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.**

Dalam melakukan suatu kerjasama atau kemitraan tentunya terdapat faktor-faktor yang menunjang dan mempengaruhi keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan kemitraan tersebut yakni faktor pendukung dan penghambat. Dalam pelaksanaan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang menunjang ataupun membantu keberhasilan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang. Adapun faktor-faktor pendukung dalam kemitraan tersebut yang dikemukakan oleh beberapa informan yaitu:

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan sebuah kemitraan tentunya harus ada beberapa faktor yang mendukung untuk menunjang keberhasilan, dalam kemitraan kami dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini sudah di dukung dengan adanya rasa saling percaya serta

terjalannya komunikasi yang terbuka antara pihak kami dengan masyarakat”. (Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat masyarakat dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

“Kemitraan antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini dapat berjalan dengan lancar karena terjalannya prinsip saling percaya dan saling menjaga kepercayaan serta adanya komunikasi yang terbuka”. (Wawancara AR, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat berhasil dengan didukung dan ditunjang oleh dua faktor yakni adanya prinsip saling percaya serta terjalannya komunikasi yang terbuka antara pihak yang bermitra.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah yang menghambat dalam keberhasilan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan berikut ini :

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Yang menghambat kemitraan kami dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini adalah belum terlaksananya prinsip keadilan dengan baik dimana kami belum membantu menanggung kerugian yang terjadi”.(Wawancara HR, 14 Agustus 2018).

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat pihak pengelola dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan:

“Dalam kemitraan kami dengan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Buttu Macca terhambat karena belum terlaksananya prinsip keadilan dengan baik dimana segala bentuk kerugian hanya kami pihak pengelola yang menanggung” (Wawancara, SR 18 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang masih terhambat pada persoalan prinsip keadilan yang belum terlaksana dikarenakan jika ada kerugian sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak pengelola saja.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yakni sebagai berikut:
  - a. Adanya prinsip saling percaya antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan objek wisata Buttu Macca.
  - b. Terjalannya Komunikasi yang terbuka antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat.
  - c. Prinsip keadilan belum sepenuhnya berjalan dengan baik antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dikarenakan belum adanya izin legalitas untuk mengelola objek wisata Buttu Macca sehingga jika ada kerugian hanya pihak pengelola dan pihak Kelompok Kerja (POKJA) yang bertanggung jawab.
2. Adapun faktor-faktor yang mendukung Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang antara lain, kepercayaan dan komunikasi.

3. Dalam Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat juga terdapat faktor penghambat yaitu belum terlaksananya prinsip keadilan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat mendukung dan meningkatkan kemitraaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diharapkan dapat mencari solusi atas faktor-faktor yang menghambat Kemitraan dalam pengembangan objek wisata Buttu Macca, agar pengembangan objek wisata tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal surat izin legalitas untuk mengelola objek wisata Buttu Macca diharapkan pihak pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pihak pengelola dalam pengurusannya.
2. Diharapka kepada pihak Kelompok Kerja dan pengelola objek wisata Buttu Macca agar sekiranya dapat sekiranya terus membangun komunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal pengurusan surat izin legalitas agar dapat meminimalisir faktor-faktora penghambat dalam mengembangkan objek wisata Buttu Macca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Laras Ayu. 2017. *Pola Kemitraan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2015. *Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication)*. Jakarta : PRENAMEDIA GROUP
- Handoyo, Eko. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Hidayat, Marceilla. 2011. *Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*. *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. 1, No. 1
- Masturi, Beatrix. 2017. *Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swata, dan Masyarakat Dalam Perwujudan Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Di Sulawesi Barat*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Muhadam, Labolo. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian , Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Pitana, I Gede & Putu G, Gayatr. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Prafitri, Gita Ratri & Maya Damayanti. 2016. *Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ketenger, Banyumas)*. *Jurnal Pengembangan Kota*. Volume 4, No. 1.
- Raman, dkk. *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai*. 2015. *Jurnal Otoritas*. Vol .5, No. 2.
- Radu, La. 2015. *Inovasi Pengelolaan Terumbu Karang (Study Kasus Tentang Coral Governance) di Kabupaten Wakatobi*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanto, Heri Muntasib' dkk. 2015. *Model Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken*. Disertasi, Bandung: IPB

Takbir, Mohammad. 2013. *Kemitraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Yunitasari, dkk. 2014. *Eksistensi Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sendang Kabupaten Wonogiri)*. Jurnal Sosialitas, Vol. 5, No. 1

## DOKUMENTASI



(Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang)



(Wawancara dengan masyarakat sekitar Objek Wisata Buttu Macca)



(Wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja (POKJA))



(Wawancara dengan pengelola objek wisata Buttu Macca)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **4480/S.01/PTSP/2018**  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Enrekang

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1934/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2018 tanggal 02 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SAMSINAR**  
Nomor Pokok : 10564 01911 14  
Program Studi : Ilmu pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**" KEMITRAAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN ENREKANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Agustus s/d 04 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tambahan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 07-08-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpmdd.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079*

**ENREKANG**

Enrekang, 13 Agustus 2018  
Kepada  
Yth. Kepala DISPOPAB Kab. Enrekang  
Di  
Enrekang

Nomor : 462/DPMPTSP/IP/VIII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 4480/S.01/PTSP/2018 Tanggal 06 Agustus 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Samsinar**  
Tempat Tanggal Lahir : Berau, 13 April 1996  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Maluang, Desa Maluang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Kalimantan Timur

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 13 Agustus 2018 s/d 04 Oktober 2018

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

a.n. BUPATI ENREKANG  
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



**HARWAN SAWATI, SE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Ketua LP3M UNISMUH Makassar.
06. Yang Bersangkutan (**Samsinar**).
07. Pertinggal.

## RIWAYAT HIDUP



**Samsinar.**, Lahir pada tanggal 13 April 1996, di Kelurahan Maluang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Penulis Merupakan Anak ke 2 dari 5 bersaudara, dari pasangan Jenab dan Nur Baya. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri 015 Gunung Tabur pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Berau dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat di SMP. Penulis melanjutkan SMA Negeri 5 Berau dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru.

Selama menjalani perkuliahan penulis pernah di kader dan mengikuti organisasi diantaranya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Cab. Makassar. Untuk memperoleh gelar sarjana penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kemitraan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang”.semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.